

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Teknologi dan Informasi (IT) saat ini telah menjadi kebutuhan primer yang memudahkan organisasi ataupun masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam perkembangan zaman, hampir seluruh organisasi baik organisasi yang lingkungannya besar maupun organisasi kecil sudah menerapkan teknologi dan informasi. Namun dalam kasus ini implementasi teknologi dan informasi tidak selalu berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan setiap organisasi. Pelaksanaan teknologi dan informasi ini bisa berkembang dan dilaksanakan dengan baik apabila implementasi strategi bisnis memiliki penerapan teknologi dan informasi yang berjalan baik [1]. Tata kelola teknologi dan informasi merupakan metode yang terstruktur sebagai pengelolaan organisasi mencakup dari kepemimpinan sebuah organisasi, struktur pengerjaan di dalam organisasi dan memantau apakah teknologi informasi itu berjalan dengan baik dalam organisasi tersebut [2]. Selain itu tata kelola teknologi dan informasi juga merupakan kumpulan dari berbagai metode dan aturan dalam menjalankan sebuah prosedur untuk mencapai tujuan strategis yang telah disepakati oleh organisasi [3]. Adapun tujuan utama teknologi dan informasi yaitu penghubung jalannya proses bisnis dan teknologi informasi agar mendapatkan keuntungan dari hasil teknologi dan informasi [2], selain itu tujuan dari tata kelola adalah untuk mengatasi masalah yang dimiliki oleh sebuah organisasi [3].

Dalam beberapa tahun ini, untuk memajukan sebuah organisasi, organisasi harus mampu memanfaatkan dan mengimplementasikan teknologi dan informasi dengan baik. Salah satu organisasi yang sudah memanfaatkan dan mengimplementasikan teknologi dan informasi adalah Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu di Indonesia. Lembaga Komisi Pemilihan Umum bertujuan untuk menerapkan hasil penghitungan suara kepada seluruh rakyat yang memilih, agar mendapatkan hasil yang transparan, cepat dan terhindar dari kecurangan [4]. Agar tujuan dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum dapat terlaksana dan terwujud maka lembaga tersebut menerapkan aturan, standar dan prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam proses tata kelola dan yang manajemen teknologi dan informasi.

Lembaga Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara memiliki unit/departemen yang bertanggung jawab dalam pengolahan teknologi dan informasi serta tata kelola teknologi

dan informasi yang semua permasalahannya terkait dengan teknologi dan informasi pada Sub Bagian Data dan Informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Sub Bagian Data dan Informasi di lembaga Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara terdapat permasalahan SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum menguasai penerapan teknologi dan informasi. Penerapan sosialisasi dalam menggunakan teknologi dan informasi yang sudah ditetapkan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum Nasional masih belum meningkatkan kualitas penggunaan teknologi dan informasi oleh SDM (Sumber Daya Manusia) lembaga di Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya pelatihan kompetensi teknologi dan informasi yang belum efektif dalam mendukung peningkatan pengetahuan di dalam mengelola penggunaan teknologi dan informasi, koordinasi antar sub bagian lembaga Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara dalam penggunaan teknologi dan informasi juga masih lemah. Hal ini dikarenakan Komisi Pemilihan Umum Nasional hanya melaksanakan pelatihan bimtek sekali dalam setahun tepatnya pada pertengahan tahun. Keadaan ini mengakibatkan para pegawai di Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara kurang kompeten di bidang yang berhubungan dengan teknologi informasi.

Ada beberapa *framework* atau kerangka kerja yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan tata kelola teknologi dan informasi suatu organisasi. Sebagaimana yang kita ketahui yaitu ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*), ISO (*International Standards Organization*), COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), serta COBIT (*Control Objective for Information and Related Technology*) [5]. *Framework* yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah *framework* COBIT 2019. COBIT 2019 ini merupakan versi terbaru dan *upgrade* dari COBIT 5. COBIT 2019 merupakan *framework* yang dikeluarkan oleh *Information Technology Governance Institute* (ITGI) di mana COBIT ini merupakan sekumpulan dokumentasi dan panduan yang mengarahkan pada tata kelola teknologi dan informasi dan manajemen IT yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna dalam mengatasi permasalahan teknis [5].

Dalam evaluasi tata kelola teknologi dan informasi, proses yang akan dilakukan pada lembaga Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara yaitu tahap pemetaan (*mapping*) untuk mendapatkan permasalahan yang akan diaudit sesuai dengan ketentuan dari COBIT 2019. Sesuai pemetaan *design factor* (*mapping*), ada tiga domain prioritas yang diidentifikasi dalam pemetaan desain faktor dan audit adalah APO04 (*Managed Innovation*), APO08 (*Managed Relationships*), dan BAI08 (*Managed Knowledge*). Pihak subdatin menilai bahwa inovasi penting untuk efisiensi dan efektivitas proses pemilu, namun tanpa pengelolaan

pengetahuan yang baik, inovasi sulit diterapkan secara berkelanjutan. Sementara itu, hubungan teknologi informasi penting untuk kerjasama, tetapi kesuksesan pemilu lebih bergantung pada pengelolaan pengetahuan teknologi. Domain BAI08 (*Managed Knowledge*) menjadi fokus utama karena manajemen pengetahuan terkait teknologi dan informasi di KPU Sumatera Utara belum optimal. Pengelolaan pengetahuan yang efektif memastikan semua petugas memahami sistem, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi secara mandiri. Pemilihan domain ini ditentukan oleh Bapak Andi Handoko, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, dengan bukti tanda tangan dan stempel resmi. Pemilihan Domain BAI08 memiliki tujuan untuk mendukung semua bagian dan sub bagian mendapatkan manajemen pengetahuan terkait penggunaan teknologi dan informasi sehingga mendukung tujuan lembaga KPU Sumatera Utara dalam berjalannya pemilihan umum yang baik, jujur dan adil. Oleh karena itu diharapkan analisis evaluasi tata kelola teknologi dan informasi ini sesuai dengan tujuan lembaga Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara yang didapatkan gambaran melalui sejauh mana *capability level* dan *maturity level* organisasi dalam mengidentifikasi manajemen pengetahuan pada sumber daya manusia yang dapat memberikan rekomendasi pada lembaga Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Tata Kelola TI Pada Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Menggunakan Framework Cobit 2019 Dengan Domain BAI08”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat ditarik perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana capaian *maturity level* dan *capability level* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari capaian evaluasi menggunakan *framework* COBIT 2019 dengan domain proses BAI08 (*Managed Knowledge*)?
2. Bagaimana hasil kesenjangan (*gap*) antara *maturity level* dan *capability level* saat ini dengan tujuan yang diharapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil evaluasi menggunakan *framework* COBIT 2019 dengan domain proses BAI08 (*Managed Knowledge*)?
3. Apa saja hasil saran perbaikan berdasarkan *standard framework* COBIT 2019 yang dicapai dalam tata kelola teknologi informasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara khususnya domain proses BAI08 (*Managed Knowledge*)?

1.3 TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui *capability level* dan *maturity level* Lembaga Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara yang diperoleh dari hasil evaluasi menggunakan *framework* COBIT 2019 dengan domain proses BAI08 (*Managed Knowledge*).
2. Mengetahui hasil kesenjangan (*gap*) antara *capability level* dan *maturity level* saat ini dengan target yang diharapkan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara berdasarkan hasil evaluasi menggunakan *framework* COBIT 2019 dengan domain proses BAI08 (*Managed Knowledge*).
3. Menghasilkan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk membantu Lembaga Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara mencapai target yang diharapkan yang mengacu pada *framework* COBIT 2019 dengan domain proses BAI08 (*Managed Knowledge*).

1.4 MANFAAT

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat menjadi referensi, acuan serta pertimbangan dalam menerapkan tata kelola teknologi informasi di Lembaga Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menggunakan *framework* COBIT 2019 khususnya domain proses BAI08 (*Managed Knowledge*).
2. Diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan rekomendasi perbaikan berupa usulan dan kebijakan dalam menerapkan tata kelola teknologi dan informasi yang baik, khususnya pada manajemen proyek di Lembaga Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi terkait pentingnya implementasi tata kelola TI agar dapat menghasilkan tata kelola TI yang berkualitas yang dapat diimplementasikan oleh organisasi.

1.5 RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup pada evaluasi tata kelola teknologi informasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada bagian tata kelola teknologi informasi di Lembaga Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara. *Stakeholder Internal* yang dilibatkan antara lain Kepala Bagian Program dan Data, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, *Head Operational*, *IT Support*, *IT Web Developer*.
2. Kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah *framework* COBIT (*Control Objective for Information and Related Technology*) 2019 dengan proses domain BAI08 (*Managed Knowledge*).

3. Data penelitian dikumpulkan berdasarkan pertanyaan yang mengacu pada pedoman yang telah disediakan *framework* COBIT 2019 pada domain BAI08 yang terdiri dari 4 subdomain yaitu: Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sumber-sumber informasi untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi, mengatur dan mengkontekstualisasikan informasi menjadi pengetahuan, menggunakan dan berbagi pengetahuan, menilai dan memperbarui atau menghentikan informasi.



UNIVERSITAS
MIKROSKIL